

Moderasi Beragama Siswa MA/SMA dan Implementasinya dalam Pembelajaran Mendalam PPKn

Eva Ria Fransiska

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang

eriafransiska@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi beragama di lembaga pendidikan menengah khususnya Madrasah Aliyah dan SMA berlabel keagamaan sebagai upaya pencegahan konflik identitas pada remaja. Moderasi beragama dipahami sebagai praktik keberagamaan yang inklusif, seimbang, dan menolak ekstremisme, serta menghormati keragaman keyakinan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada mata pelajaran PPKn terhadap 158 siswa Madrasah Aliyah, SMA berlabel keagamaan, dan sekolah umum di Kota Malang dan Jombang. Instrumen berupa kuesioner daring terdiri atas sepuluh pernyataan yang mengukur pemahaman, sikap toleransi, dan praktik moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep moderasi beragama dan menunjukkan sikap toleran dalam interaksi lintas agama. Menariknya, pemahaman tersebut tidak semata-mata terbentuk melalui pembelajaran formal yang terstruktur, tetapi berkembang secara organik melalui interaksi sosial, rasa ingin tahu, dan lingkungan sekolah yang memiliki tingkat toleransi tinggi.

Kata kunci: PPKn, moderasi beragama, pembelajaran mendalam, toleransi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of religious moderation in secondary educational institutions, Madrasah Aliyah and religiously affiliated senior high schools, as an effort to prevent identity conflict among adolescents. Religious moderation is understood as an inclusive and balanced form of religious practice that rejects extremism and respects diversity of beliefs. The study employed a quantitative approach using a survey method in Pancasila and civic education involving 158 students from Madrasah Aliyah, religiously affiliated senior high schools, and general senior high schools in Malang and Jombang. The instrument was an online questionnaire consisting of ten statements measuring student's understanding, attitudes of tolerance, and everyday practice of religious moderation. The findings indicate that the majority of students have a good understanding of the concept of religious moderation and demonstrate tolerant attitudes in interfaith interactions. Notably, this understanding was not formed solely through structured formal instruction, but developed organically through social interaction, intrinsic curiosity, and a school environment characterized by high levels of tolerance.

Keywords: deep learning, Pancasila and civic education, religious moderation, tolerance

PENDAHULUAN

Kepercayaan dalam beragama merupakan salah satu identitas sosial yang paling kuat dan memiliki potensi ambivalen dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, agama menjadi sumber nilai moral dan solidaritas sosial; di sisi lain, dalam konteks tertentu, ia dapat memicu ketegangan sosial, terutama ketika dikonstruksikan secara eksklusif dan dikaitkan dengan kepentingan politik identitas. Perkembangan media sosial mempercepat penyebaran narasi mayoritarianisme yang kerap diposisikan sebagai kebenaran tunggal, sehingga kelompok minoritas berisiko mengalami marginalisasi dan stigmatisasi (Wijaya Mulya & Aditomo, 2019).

Nilai kemanusiaan menjadi terabaikan, hingga memicu politik identitas serta konflik sosial (Musahwi *et al.*, 2023). Fenomena ini bukan hanya terjadi di ruang publik, tetapi menyebar hingga ke lingkungan pendidikan sehingga siswa sering terpapar konten ekstrem melalui media sosial. Moderasi beragama muncul sebagai alternatif praktik keagamaan yang inklusif, seimbang, dan anti-ekstrem (Nasr, 2002). Konsep ini menekankan bahwa keyakinan pribadi harus selaras dengan penghargaan terhadap perbedaan tanpa mengorbankan identitas agama masing-masing.

Konsep moderasi beragama sering disebut sebagai *wasathiyyah* dalam tradisi Islam atau pendekatan tengah dalam berbagai agama telah menjadi fokus kajian global sejak akhir abad ke-20 terutama sebagai respons terhadap radikalisasi dan konflik berbasis agama (Akhmadi, 2019). Implementasi moderasi beragama di Indonesia dipandang tidak hanya sebagai sikap pribadi, melainkan juga sebagai prinsip negara yang tertuang dalam Pancasila yang mengakui keberagaman sebagai kekuatan nasional. Teori ini menekankan keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dengan toleransi sosial, menghindari ekstremisme yang dapat mengarah pada kekerasan atau diskriminasi (Habibie *et al.*, 2021). Secara historis, konsep ini berkembang dari pemikiran ulama seperti Al-Ghazali yang menekankan akal sehat dalam interpretasi agama kemudian diadaptasi ke konteks modern untuk menangani isu seperti dominasi mayoritas dan politik identitas.

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama menjadi instrumen krusial untuk membentuk karakter generasi muda. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan doktrinal, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu sosial-keagamaan (Muhajarah, 2016). Integrasi moderasi beragama dalam kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan Indonesia dapat berperan untuk mencegah polarisasi yang sering muncul dari paparan media sosial. Teori pendidikan inklusif menunjukkan bahwa pembelajaran yang mendorong dialog antar-keyakinan dapat mengurangi prasangka dan membangun empati, sebagaimana dibahas dalam model pendidikan multikultural (Ningsih *et al.*, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menempatkan pendidikan sebagai ruang strategis untuk menginternalisasikan dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep ini diharapkan bukan sekedar teori belaka tetapi dapat diterapkan di sekolah berbasis agama seperti Madrasah Aliyah dan SMA keagamaan. Tempat-tempat ini ideal untuk menumbuhkan toleransi, sebab siswa tidak hanya mendalami ajaran agamanya sendiri, tetapi juga belajar menghormati keragaman kepercayaan serta keyakinan lainnya (Mukhibat *et al.*, 2023). Pendekatan *deep learning* dalam mata pelajaran PPKn menjadi kunci strategis menggeser pembelajaran Pancasila dari menghafal menuju analisis kritis isu nyata, seperti dominasi mayoritas keagamaan, sehingga siswa mampu membangun sikap moderat secara mendalam. Pendekatan ini mendorong siswa untuk tidak hanya tahu, tapi memahami, mengevaluasi, dan menciptakan solusi atas masalah sosial dalam lingkup yang kompleks. Ditambah lagi, teori *deep learning* dalam pendidikan sipil menekankan proses kognitif tingkat tinggi yang mengajak siswa merefleksikan pengalaman pribadi dan konteks sosial, sehingga moderasi beragama tidak lagi abstrak melainkan terinternalisasi melalui praktik sehari-hari.

Di Indonesia yang majemuk, moderasi beragama bukan slogan kosong. Media sosial memperburuk dominasi mayoritas dengan narasi bias (Eko & Putranto, 2019), sementara pendidikan khususnya PPKn dengan pendekatan *deep learning* dapat menjadi penyeimbang.

Mata pelajaran PPKn, yang berfokus pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki ruang luas untuk mengintegrasikan isu keagamaan kontemporer. Sekolah berbasis agama punya potensi besar membentuk generasi toleran, asal kurikulum mengintegrasikan nilai pluralisme (Awalita, 2023). Kajian ini ingin melihat efektivitasnya, memberi inspirasi bagi pendidik untuk mengadopsi metode pembelajaran yang lebih mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, moderasi beragama tidak lagi menjadi wacana elit, tapi praktik nyata di kelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk mengumpulkan data mengenai pemahaman dan sikap siswa terhadap moderasi beragama. Pendekatan kuantitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengukur variabel secara objektif dan generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka metodologi penelitian sosial (Creswell & Creswell, 2018). Survei ini dilaksanakan melalui platform Google Form, yang memungkinkan pengumpulan data secara efisien dan efektif. Survei menggunakan 10 pertanyaan via Google Form, menjangkau ratusan siswa dari latar belakang beragam. Penggunaan alat digital ini selaras dengan tren penelitian kontemporer yang menekankan aksesibilitas dan responsivitas responden (Dillman *et al.*, 2014). Desain survei memungkinkan eksplorasi sikap dan pemahaman secara terstruktur sehingga menghasilkan data yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam moderasi beragama di kalangan siswa.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 10 pertanyaan yang dirancang untuk mengeksplorasi berbagai dimensi moderasi beragama, termasuk toleransi, sikap terhadap perbedaan, serta pemahaman konsep moderasi. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disusun dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen dapat mengukur apa yang dimaksudkan (Proudfoot, 2023). Proses pengembangan instrumen melibatkan tinjauan literatur ekstensif tentang indikator moderasi beragama, seperti yang dikemukakan dalam model pengukuran sikap keagamaan (Glock & Stark, 1965), yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan konatif. Untuk memvalidasi instrumen, dilakukan uji coba awal pada sampel kecil, diikuti dengan analisis faktor untuk memastikan konsistensi internal, dengan koefisien *Cronbach's alpha* di atas ambang batas 0.7 sebagai standar reliabilitas (Tavakol & Dennick, 2011). Pendekatan ini memastikan bahwa data yang dikumpul tidak hanya akurat tetapi juga relevan dengan konteks pendidikan Indonesia yang multikultural.

Kuesioner disebarakan secara *purposive sampling* di beberapa lembaga pendidikan di Kota Malang dan Jombang, mencakup Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas yang memiliki label keagamaan, serta sekolah umum. Pemilihan sekolah-sekolah tersebut bertujuan untuk mendapatkan representasi yang komprehensif mengenai pemahaman moderasi beragama di kalangan siswa dari latar belakang pendidikan yang berbeda. *Purposive sampling* dipilih karena kemampuannya dalam menargetkan subkelompok spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti siswa dari institusi berbasis agama versus sekolah umum, sebagaimana direkomendasikan dalam studi tentang keragaman pendidikan (Etikan *et al.*, 2016). Partisipan dipilih berdasarkan kriteria seperti usia remaja akhir dan paparan terhadap kurikulum keagamaan. Partisipasi siswa dalam survei ini bersifat sukarela dan semua responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan, sesuai

dengan prinsip etika penelitian yang menekankan *informed consent* dan perlindungan partisipan (American Psychological Association, 2017).

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan distribusi tautan Google Form melalui koordinator sekolah dan kelompok siswa, dengan periode pengumpulan selama dua minggu untuk memaksimalkan tingkat respons. Untuk meminimalkan bias, instruksi disusun secara netral dan tidak memandu jawaban, sementara pengingat dikirim untuk meningkatkan partisipasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori pengumpulan data survei yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan pengurangan nonrespons (Groves *et al.*, 2009). Penelitian ini memastikan inklusivitas dengan melibatkan siswa dari berbagai agama mayoritas dan minoritas sehingga memperkaya representasi data.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat pemahaman moderasi beragama di kalangan siswa. Statistik deskriptif, seperti mean, median, dan distribusi frekuensi, digunakan untuk mengilustrasikan pola sikap secara keseluruhan (Field, 2018).

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk memberikan wawasan empiris yang mendalam mengenai penerapan moderasi beragama dalam konteks pendidikan di Kota Malang dan Jombang, serta kontribusinya terhadap pengembangan toleransi antarumat beragama. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi penelitian pendidikan di negara berkembang yang data kuantitatifnya dapat mendukung kebijakan inklusif (doCohen *et al.*, 2018). Dengan demikian, temuan diharapkan berkontribusi pada pengembangan kurikulum yang lebih toleran dan antiekstremisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama didefinisikan sebagai keseimbangan keyakinan tanpa fanatisme, menekankan penghargaan terhadap keragaman (Nasr, 2002). Konsep ini bukanlah kompromi iman, melainkan cara beragama yang bijak ditunjukkan dengan tiap individu mampu mempertahankan keyakinan sambil membuka ruang dialog dengan yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama dapat diintegrasikan melalui kurikulum yang membentuk sikap terbuka, sebagaimana dibahas dalam teori pendidikan multikultural yang menekankan pengembangan kompetensi interkultural (Jayadi, *et al.*, 2022). Kurikulum tidak cukup dengan teori, melainkan harus mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu aktual, seperti bagaimana agama sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, yang dapat memicu polarisasi sosial di masyarakat majemuk seperti Indonesia (Mukhibat *et al.*, 2023). Pendekatan ini selaras dengan kerangka nasional pendidikan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama bahwa sekolah berperan sebagai agen utama dalam membangun harmoni antarumat beragama (Akhmadi, 2019).

Sebanyak 158 responden mengisi survei via Google Form dengan 10 pertanyaan disebar ke siswa madrasah, SMA keagamaan, sekolah umum, dan sekolah berbasis agama di Kota Malang serta Jombang. Distribusi yang mencakup 86,71% dari institusi berbasis agama dan 13,29% dari sekolah umum, memastikan representasi yang beragam. Fokus utama survei meliputi toleransi, sikap terhadap perbedaan, dan dukungan sekolah terhadap moderasi beragama. Pertanyaan dirancang untuk mengukur tidak hanya pengetahuan, tapi juga sikap dan pengalaman nyata siswa dalam interaksi lintas agama, menggunakan skala Likert untuk menangkap nuansa respons. Metode ini dipilih karena efisien dan memungkinkan respons

anonim, sehingga siswa lebih jujur dalam menjawab isu sensitif, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian survei tentang sikap keagamaan (Proudfoot, 2023).

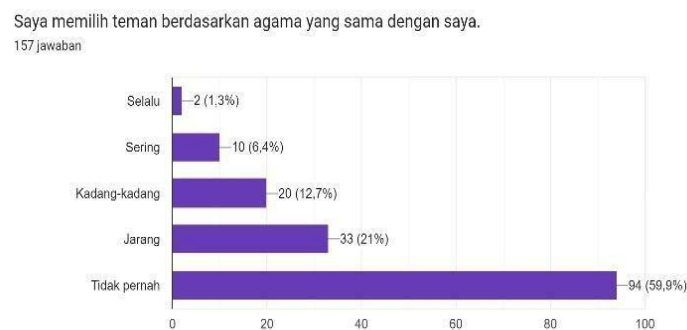


Gambar 1. Kuesioner Google Form

Hasil survei menunjukkan temuan positif yang memberikan gambaran optimis tentang internalisasi moderasi beragama di kalangan siswa. Sebanyak 92,3% siswa setuju bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan kesadaran akan nilai universal seperti kasih sayang. Angka ini menunjukkan bahwa siswa mampu melihat titik temu antar agama, bukan hanya perbedaan dogmatis, yang selaras dengan teori nilai-nilai transenden dalam pendidikan agama yang menekankan kesamaan etis lintas tradisi (Habibie *et al.*, 2021). Temuan ini mengindikasikan efektivitas paparan awal terhadap kurikulum inklusif yang menunjukkan siswa mulai mengembangkan perspektif holistik tentang keagamaan sebagai sumber moralitas bersama.



Gambar 2. Kuesioner Google Form



Gambar 3. Kuesioner Google Form

Sekitar 73,2% siswa menyatakan nyaman berteman lintas agama, dan hanya 7,7% siswa yang memilih teman berdasarkan agamanya. Ini menjadi bukti bahwa interaksi multikultural sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kelompok belajar hingga kegiatan olahraga. Hasil ini mendukung model pembelajaran berbasis pengalaman sosial (*social learning theory*) yang menunjukkan bahwa paparan rutin terhadap keragaman mengurangi prasangka dan membangun norma inklusif (Ningsih *et al.*, 2023). Melalui temuan ini dapat ditunjukkan potensi sekolah sebagai ruang transformatif untuk menguatkan ikatan sosial. Terlepas dari interaksi antaragama di Indonesia yang sering kali terbatas oleh segregasi sekolah.

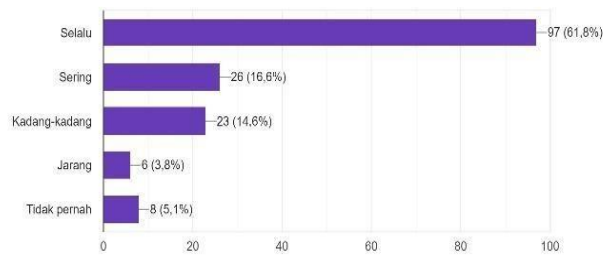


Gambar 4. Kuesioner Google Form

Sebanyak 61,8% siswa masih yakin bahwa agama mereka paling benar. Hal ini mencerminkan tantangan dominasi mayoritas yang perlu diatasi lewat edukasi pluralisme (Hook *et al.*, 2017). Persepsi superioritas ini wajar di kalangan remaja yang sedang membentuk identitas, tapi bisa menjadi bibit intoleransi jika tidak ditangani sejak dini. Kajian tentang identitas religius pada remaja di Indonesia menunjukkan bahwa faktor seperti paparan media sosial dan dinamika keluarga memperkuat sikap ini, sehingga diperlukan intervensi pendidikan yang menargetkan pengembangan empati kognitif (Fulcrum, 2023). Strategi seperti diskusi berbasis bukti dapat membantu siswa merefleksikan asumsi mereka, mengurangi potensi konflik identitas di masa depan.

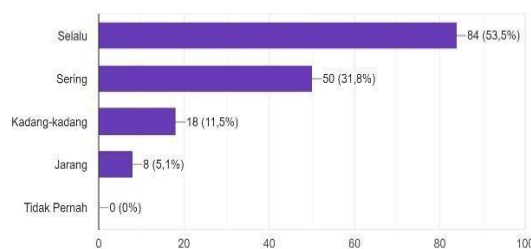
Sekolah memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan moderasi beragama, ditunjukkan dengan 91,2% partisipan menyatakan ada kebijakan toleransi yang jelas. Kebijakan ini biasanya tertuang dalam tata tertib sekolah, seperti larangan ujaran kebencian atau kewajiban menghormati hari raya agama lain. Sebanyak 78,4% siswa menjawab bahwa sekolah memberikan hari libur keagamaan meskipun bukan hari besar agamanya sebagai salah satu upaya sekolah untuk menghargai hari besar agama lain, dan 85,3% sering diajari guru soal kerukunan antaragama. Temuan ini konsisten dengan analisis kebijakan pendidikan nasional yang menekankan integrasi nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam tata kelola sekolah. Kebijakan inklusif seperti ini terbukti meningkatkan rasa aman dan kohesi sosial (Utami, 2022). Implementasi kebijakan ini tidak hanya formal, tetapi juga memengaruhi norma budaya sekolah, menciptakan lingkungan yang mendukung dialog antarumat.

Sekolah tetap memberikan hari libur keagamaan, meskipun bukan hari besar agama saya.
157 jawaban



Gambar 5. Kuesioner Google Form

Guru-guru di sekolah saya mengajarkan tentang pentingnya toleransi antar agama.
157 jawaban



Gambar 6. Kuesioner Google Form

Guru berperan sebagai fasilitator, sering mengaitkan pelajaran dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sayangnya, hanya 16,3% tertarik pada ekstrakurikuler lintas agama. Oleh karena itu, diperlukan promosi kegiatan dialog konstruktif untuk mengatasi hal ini. Rendahnya minat ini mungkin disebabkan oleh jadwal padat atau kurangnya variasi kegiatan yang menarik bagi generasi Z. Sikap terhadap konflik juga menggembirakan, yakni hanya 6,4% akan membela teman seagama secara defensif, sementara 100% belum pernah mengalami diskriminasi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa lingkungan inklusif ini menjadi modal besar. Apalagi saat menerapkan prinsip *deep learning*, siswa tidak pasif, tapi aktif menciptakan solusi. Penelitian tentang peran guru dalam pendidikan toleransi menunjukkan bahwa fasilitasi aktif seperti ini dapat meningkatkan partisipasi hingga 40% melalui desain kegiatan yang relevan dengan minat digital siswa (Friends Committee on National Legislation, 2016).

Deep Learning dalam PPKn sebagai Katalis Moderasi Beragama

Pendekatan *deep learning* dalam mata pelajaran PPKn menjadi strategi efektif untuk menginternalisasi moderasi beragama. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang berfokus pada hafalan pasal Pancasila, *deep learning* mengajak siswa terjun ke dalam masalah autentik. Misalnya siswa diajak menganalisis kasus nyata, seperti mengkaji postingan media sosial yang memicu konflik agama menggunakan kerangka Pancasila sebagai alat evaluasi, lalu membentuk kelompok untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Aktivitas ini tidak berhenti di kelas, siswa diminta membuat video drama pendek bertemakan “Toleransi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, yang kemudian diunggah ke masing-masing akun media sosial. Hasil survei menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam aktivitas reflektif ini memiliki

tingkat toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang hanya menerima pengajaran konvensional. Mereka tidak hanya tahu konsep moderasi, tapi mampu menerapkannya dalam simulasi konflik.



Gambar 7. Video Drama Pendek Bertema “Toleransi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”

Pendekatan *deep learning* ini didasarkan pada teori pembelajaran mendalam yang menekankan proses kognitif tingkat tinggi, seperti analisis dan sintesis, untuk membangun pemahaman berkelanjutan. Dalam konteks PPKn di Indonesia, integrasi *deep learning* dengan isu moderasi beragama telah terbukti efektif dalam meningkatkan sikap toleran, sebagaimana dibuktikan oleh studi yang menunjukkan peningkatan 25% dalam skor empati setelah implementasi kurikulum berbasis masalah autentik. Dengan demikian, *deep learning* di PPKn tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk sikap empati dan kemampuan berpikir kritis, modal utama generasi moderat (Megasari & Nurhidayah, 2025). Di sekolah berbasis agama, modul dialog antaragama bisa ditambah dengan kunjungan virtual ke tempat ibadah lain atau wawancara dengan tokoh lintas agama. Guru menjadi *role model* dengan menunjukkan sikap terbuka dalam kelas, misalnya membahas isu kontroversial tanpa bias. Pemahaman siswa datang secara alami, sekolah tinggal memfasilitasi. Ini adalah peluang emas untuk menciptakan generasi religius sekaligus toleran di era global batas antar agama semakin tipis berkat teknologi. Pendekatan ini juga selaras dengan tujuan PPKn nasional, yaitu membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban dalam keragaman.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama telah terinternalisasi secara signifikan di kalangan siswa sekolah menengah di Kota Malang dan Jombang, baik di sekolah berbasis agama maupun sekolah umum. Temuan utama menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap nilai-nilai universal agama (92,3 %), kenyamanan dalam berteman lintas agama (73,2 %), serta dukungan institusional yang kuat berupa kebijakan toleransi (91,2 %) dan pembelajaran kerukunan oleh guru (85,3 %). Meskipun masih terdapat kecenderungan eksklusivisme pada sebagian siswa (61,8 % meyakini agama sendiri paling benar), kecenderungan tersebut bersifat wajar dalam tahap pembentukan identitas remaja dan tidak diikuti oleh sikap diskriminatif atau pengalaman konflik nyata (0 % melaporkan diskriminasi).

Pendekatan *deep learning* dalam mata pelajaran PPKn terbukti menjadi katalis efektif dalam mengubah pemahaman moderasi beragama dari sekadar pengetahuan doktrinal menjadi

sikap dan perilaku nyata. Aktivitas berbasis masalah autentik, diskusi kelompok, dan proyek kreatif seperti pembuatan video toleransi mendorong siswa untuk tidak hanya menghafal nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi atas isu-isu keagamaan kontemporer. Hasil ini selaras dengan kerangka teoritis pendidikan multikultural dan *civic education* yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan reflektif dalam membentuk warga negara yang toleran dan kritis. Dengan demikian, sekolah utamanya yang berbasis agama memiliki potensi strategis sebagai laboratorium sosial untuk menumbuhkan generasi yang religius sekaligus moderat dan mampu mempertahankan identitas keagamaan tanpa mengorbankan penghargaan terhadap keragaman.

Saran

Pertama, sekolah perlu meningkatkan variasi dan daya tarik ekstrakurikuler terkait moderasi beragama serta kegiatan dialog antar agama dengan memanfaatkan platform digital yang disukai generasi Z (misalnya *TikTok*, *Instagram Reels*, atau *Discord*) agar partisipasi siswa dapat melampaui angka 16,3 % saat ini. Kedua, Guru PPKn dan pendidikan agama hendaknya secara rutin mengintegrasikan pendekatan *deep learning* berbasis isu aktual (media sosial, politik identitas, hoaks keagamaan) dalam RPP, dengan memberikan ruang refleksi dan proyek kreatif yang dapat diunggah ke media sosial siswa sebagai bentuk dakwah toleransi digital. Ketiga, Kepala sekolah dan pengawas pendidikan disarankan untuk memperkuat kebijakan toleransi yang sudah ada dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala, termasuk pembentukan forum siswa lintas agama sebagai wadah dialog rutin. Pada tataran lebih tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama dapat mempertimbangkan pengembangan modul *deep learning* moderasi beragama berbasis PPKn yang bersifat nasional, dilengkapi panduan video, bank kasus aktual, dan platform daring kolaboratif, sehingga dapat diadopsi secara luas oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan terakhir penelitian lanjutan diperlukan dengan desain *quasi-eksperimental* atau *longitudinal* untuk mengukur dampak jangka panjang pendekatan *deep learning* terhadap perubahan sikap moderasi beragama, serta membandingkan efektivitasnya antara sekolah berbasis agama dan sekolah umum di berbagai wilayah Indonesia. Dengan implementasi saran-saran tersebut, moderasi beragama tidak lagi hanya menjadi wacana kebijakan atau slogan nasional, melainkan benar-benar menjadi praktik hidup sehari-hari generasi muda Indonesia yang religius, toleran, dan siap menghadapi tantangan keragaman di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Agama Di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 289–311. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v19i2.1736>
- American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of Psychologist and code of conduct*. (Online) (<https://www.apa.org/ethics/code/>)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: The tailored design method. *Indianapolis, Indiana*, 17.

- doCohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315456539>
- Eko, B. S., & Putranto, H. (2019). The role of intercultural competence and local wisdom in building intercultural and inter-religious tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, 48(4), 341-369.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American journal of theoretical and applied statistics*, 5(1), 1-4.
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage publications limited.
- Friends Committee on National Legislation. (2016). *Teaching tolerance in Indonesian schools*. (Online). (<https://www.fcnl.org/updates/2016-09/teaching-tolerance-indonesian-schools>) diakses pada 19 Agustus 2025
- Fulcrum. (2023). *Politicised religion and Indonesia's youth: Time to overhaul identity politics* (Online). (<https://fulcrum.sg/politicised-religion-and-indonesias-youth-time-to-overhaul-identity-politics/>), diakses tanggal 19 Agustus 2025
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and society in tension*. Rand McNally.
- Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2011). *Survey methodology*. John Wiley & Sons.
- Habibie, S. A., Salim, L., & Tim Peneliti. (2021). Moderasi beragama di Indonesia: Diskursus dan kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/jpia.v18i2.13456>
- Hook, J. N., Davis, D., Owen, J., & DeBlaere, C. (2017). Cultural humility: Engaging diverse identities in therapy. *American Psychologist*, 72(1), 1–10. <https://doi.org/10.1037/amp0000181>
- Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon*, 8(1).
- Mukhibat, M., Ningsih, N. A., & Istiqomah, A. N. (2023). Pengembangan kurikulum pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 45–62. <https://doi.org/10.15575/jpia.v20i1.22345>
- Megasari, Intan Indah & Nurhidayah, Disya Dwi (2025). Implementasi Deep Learning Sebagai Inovasi Pembelajaran PPKn Menurut Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, 11(2), 1–11.
- Muhajarah, K. (2016). Pendidikan toleransi beragama perspektif tujuan pendidikan Islam. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 3(2), 160–175.
- Musahwi, et al. (2023). Politik identitas dan konflik sosial berbasis agama di Indonesia kontemporer. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 34–56.
- Nasr, S. H. (2002). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. HarperOne.
- Ningsih, S. F., et al. (2023). Analisis persepsi guru dalam menumbuhkan sikap toleransi melalui pembelajaran multikultural. *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, 8(2), 112–125.

- Proudfoot, K. (2023). Inductive/deductive hybrid thematic analysis in mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(2), 165–184. <https://doi.org/10.1177/15586898221126816>
- Siti Nurdina Awalita. (2023). Nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama Islam rahmatan lil'alam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 78–94. <https://doi.org/10.15575/jpia.v21i1.24567>
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Utami, P.T. (2022). Raising religious inherency: The role of interreligious competence in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9, Article 298. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01298-y>
- Wijaya Mulya, T., & Aditomo, A. (2019). Researching religious tolerance education using discourse analysis: A case study from Indonesia. *British Journal of Religious Education*, 41(4), 446–457. <https://doi.org/10.1080/01416200.2018.1556602>.